

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- \_\_\_\_\_. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta. 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. 1990.
- Friedman, W. 1953 dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Fuady, Munir. *Kontrak Pemborong Mega Proyek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- Gunanegara. *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet. Pertama. Jakarta: Tata Nusa. 2008.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gajah mada University Press. 2010.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Hatta, Mohammad. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah: Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan Dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa, Cetakan I*. Yogyakarta: Media Abadi. 2005.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jogjakarta: Kanisius. 1982.

- Hutagalung, Arie Sukanti. *Analisa Yuridis Keppres 55 Tahun 1993*, Jakarta: Diklat DDN, 2001.
- \_\_\_\_\_, dan Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Ed. 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI. 2005.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising. 2006.
- Joesoef, Iwan E. *Perjanjian Pengusaha Jalan Tol (PPJT) Sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik Antara Pemerintah Dengan Investor (Swasta) Dalam Proyek Infrastruktur, Cetakan Pertama*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2006.
- Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Sastra Hukum dan Seni)*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Kalo, Syafruddin. *Kapita Selekta Hukum Pertanahan Studi Tanah Perkebunan Di Sumatera Utara*. Medan: USU Press. 2005.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 2004.
- Kerlinger, F.N. *Foundation of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. 1973.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta. 1995.
- Limbong, Bernahard. *Reforma Agraria*. Jakarta: PT.Dharma Karsa Utama. 2012.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Diktat Kuliah Teori Hukum*. 2006.
- Lubis, Muhammad Yamin, dan Abdul Rahman Lubis. *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Muchsin, Imam Koeswahyono., dan Soimin. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Cetakan Pertama*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Cetakan II, Edisi Revisi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2006.
- Mustafa, Bachsan. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- OK. Mahendra, AA. *Menguak Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Parlindungan, AP. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Pelaksanaan Landreform*. Bahagian I, Bandung: Mandar Maju. 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Rubaie, Achmad. *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia. 2007.
- Rusyaidi, Achmad. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Safik, Ahmad. *Tanah Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Pertama*. Jakarta: FHUI. Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi. 2006.
- Salindheo, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Grafika, 1988.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Penerbit CV. Utomo. 2006.
- Sihombing, Eka Irene. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta : Universitas Trisakti. 2009.
- Simbolon, Binsar. *Prinsip Dasar Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Materi Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 2009.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 1996.
- \_\_\_\_\_ dan Martin Samosir. *Hukum Pertanahan Dalam berbagai Aspek*. Medan: Bina Media. 2000.
- Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Susilo, Yusuf. *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1990.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Gema Clipping Service Hukum. 1991.

## **B. Makalah dan Jurnal**

- Bahari, Syaiful. "Negara dan Hak Rakyat Atas Tanah". *Harian Kompas*. Tanggal 13 Mei 2005.
- Hasibuan, Ahman Husein. "Masalah Perkotaan Berkaitan dengan Urbanisasi dan Penyediaan Tanah". Jakarta: Makalah. 1986.
- MP3EI News. "Aturan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Memulihkan Rasa Saling Percaya", Edisi Perdana. Jakarta: Buletin Koridor. 2012.

Ramli, Ahmad M. "Reformasi bidang hukum; menuju negara hukum yang demokratis". Jakarta: Makalah. 2008.

Sanusi. "Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan". Bandung: Makalah. 2005.

Sihombing, Eka Irene. "Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan". Jakarta : Universitas Trisakti. 2009.

Sunito, Frans. "Sidang Komisi Pembangunan Infrastruktur - National Summit 2009". Makalah. Jakarta: Kadin Indonesia. 2009.

### **C. Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LN No.104 Tahun 1960.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

#### **D. Internet**

Achmad Rusyaidi. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan HAM". [http:// www. prp makasar. wordpress.com/2009/02/13](http://www.prp.makassar.wordpress.com/2009/02/13).

Blog Spot, "Hak Menguasai Negara", [http :// pengurusan – hat. Blog spot. Com /2008/08/ hak menguasai negara. Html](http://pengurusan-hat.blogspot.com/2008/08/hak-menguasai-negara.html).

Eddy Leks, "Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", [http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2012/09/10/ penyelenggaraan-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/](http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2012/09/10/penyelenggaraan-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/).

Hari Sudyono, " Kepentingan Umum (Bonum Commune)", [http://harisudyono1. blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html](http://harisudyono1.blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html).

Roosdiono & Partners, "Undang-Undang Pertanahan yang Baru".

Rusyaidi, Achmad. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan HAM". [http:// prp makasar.Wordpress.com/2009/02/13](http://prp.makassar.wordpress.com/2009/02/13), terakhir diakses tanggal 11 November 2013.

Sudyono, Hari. "Kepentingan Umum (Bonum Commune)", [http://harisudyono1. blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html](http://harisudyono1.blogspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html), terakhir diakses tanggal 15 Pebruari 2014.

The Globe Journal, "Undang-undang Pengadaan Tanah Baru efektif 2013.

“Dua Kelemahan UU Pengadaan Tanah”, <http://www.centroone.com/news/2012/08/1m/dua-kelemahan-uu-pengadaan-tanah/>, terakhir diakses tanggal 28 April 2014.

